

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBSI UNSRAT)

**ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI INDONESIA**

Sri Rustiningrum; Kumba Digdowniseiso

Universitas Nasional

ARTICLE INFO

Keywords:

Budget, Education, Indonesia

Kata Kunci:

Anggaran, Pendidikan, Indonesia

Corresponding author:

Kumba Digdowniseiso

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

Abstract. Education as a learning tool that can increase insight and knowledge and make the community have more value and be able to explore and develop them existing potentials, so that they become quality human resources. The government provides an allocation of education funds with a minimum amount of 20% of the total state budget each year. With this high budget allocation, education in Indonesia should be able to reach all people. However, children drop out of school still happen because of motivation and economic factors. Most of the education budget allocation is still used for the payment of salaries for teachers so that the education quality has not been considered, even though it should be with a large budget that the education quality can be improved and developed. The purpose of this study is to find out how the education budget allocations in the APBN in Indonesia. The research method is to conduct a literature review. The results obtained are: 1. Education budget is allocated more for local governments than for the central government. 2. Indonesia has a large proportion of the expenditure budget and this budget is mostly used to pay teachers. 3. There has been no effort to improve the quality of education that has been able to motivate people to attend education.

Abstrak. Pendidikan sebagai sebuah pembelajaran yang bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta menjadikan masyarakat memiliki nilai lebih serta mampu menggali potensi-potensi yang ada kemudian mengembangkannya sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah menyediakan alokasi dana pendidikan dengan jumlah minimal 20% dari keseluruhan anggaran negara setiap tahunnya. Dengan alokasi anggaran yang cukup tinggi tersebut seharusnya pendidikan di Indonesia sudah dapat menjangkau seluruh masyarakat. Akan tetapi masih terjadi anak putus sekolah yang disebabkan kurangnya motivasi dan faktor ekonomi. Alokasi anggaran pendidikan sebagian besar masih digunakan untuk pembayaran gaji bagi guru sehingga kualitas pendidikan sendiri belum diperhatikan, padahal seharusnya dengan anggaran yang besar maka kualitas pendidikan bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alokasi anggaran pendidikan dalam APBN di Indonesia. Metode penelitian adalah dengan melakukan kajian literatur. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1. Anggaran pendidikan yang besar lebih banyak dialokasikan untuk pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat. 2. Indonesia memiliki proporsi anggaran belanja yang besar dan anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk menggaji guru. 3. Belum ada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang mampu memotivasi masyarakat agar mengikuti pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan diibaratkan sebagai sebuah pondasi dalam hidup yang harus dibangun dengan sebaik mungkin. Secara umum pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, ketrampilan serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari satu generasi ke generasi lainnya. Pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, kepribadian serta ketrampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, karena dengan pendidikan maka suatu negara akan bisa maju. Oleh karena itu suatu bangsa akan dikatakan maju ketika tenaga pendidiknya memiliki kualitas dan mampu melahirkan generasi yang cerdas untuk mengembangkan bangsa dan negara. Pendidikan akan memiliki banyak manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Digdowiseiso: Pendidikan untuk anak, misalnya, tidak hanya memberi manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tetapi juga bagi masyarakat. Orang-orang yang berpendidikan akan lebih produktif, lebih berperilaku positif, dan akan memiliki selera yang lebih mapan dalam barang dan jasa, yang merupakan ciri-ciri masyarakat terdidik (Digdowiseiso, 2015, 25).

Dengan demikian, memiliki pendidikan dengan baik akan menimbulkan kreativitas, mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Sangat penting bagi warga negara untuk mengembangkan potensi mereka serta mampu meningkatkan kualitas. Anak-anak sebaiknya mendapatkan pendidikan yang cukup bagi masa depannya agar menjadi generasi cerdas, mampu mengembangkan kreativitas dan kemandirian dari potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu masyarakat atau setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Mengingat pentingnya pendidikan, maka setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara untuk dapat menikmatinya. Bahwa pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 UUD amandemen. Bunyi Pasal 31 UUD 45 hasil perubahan tersebut adalah:

- (1) Setiap warga berhak mendapat pendidikan;
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; dan ayat
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara dalam rangka mencerdaskan mereka dengan memenuhi hak-haknya. Maka pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan segala keperluan pendidikan yaitu dengan memberikan anggaran belanja bagi pendidikan agar seluruh masyarakat dapat menikmati pendidikan sebaik mungkin. Pemerintah menyediakan dana pendidikan yang dialokasikan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Harapan dari alokasi dana pendidikan ini adalah seluruh jumlahnya mencukupi untuk kebutuhan pendidikan masyarakat di Indonesia secara layak sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak berpendidikan.

Akan tetapi pada kenyataannya, saat ini masih saja terjadi anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah di Indonesia. Dari data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didapatkan data bahwa masih terjadi tingginya kasus anak putus sekolah dengan rincian sebagai berikut:

NO	Tingkat Pendidikan	Tahun Ajaran 2016/2017	Tahun Ajaran 2017/2018	Tahun Ajaran 2018/2019	Tahun Ajaran 2019/2020
1	SD	39,213	73,384	106,014	32,395
2	SMP	38,702	51,190	35,545	38,464
3	SMA	36,419	31,123	52,142	26,864
4	SMK	72,744	73,384	106,014	32,395

Sumber: <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php>

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah siswa putus sekolah masih tinggi di Indonesia. Putus sekolah merupakan permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar, sebab seseorang yang mengalami putus sekolah mempunyai banyak problem dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut akan berdampak pada kelangsungan hidup remaja yang mengalami putus sekolah, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Masalah-masalah yang dialami remaja putus sekolah diantaranya adalah: 1) Tidak dihargai (diremehkan) teman bermain; 2) Dipandang sebelah mata oleh masyarakat; 3) Kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak; 4) Keadaan ekonomi atau keuangan rendah; dan 5) Risiko terjerumus ke dalam kenakalan remaja lebih besar. (Nahrodin, 2016, 38).

Apabila angka putus sekolah dibiarkan terus-menerus terjadi maka dapat mengurangi kualitas generasi yang akan datang. Jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan masalah bagi masa depan bangsa, sehingga pemerintah harus dapat menemukan solusi dalam mengatasi masalah ini. Bahwa penyebab masyarakat tidak dapat menikmati kesempatan memperoleh pendidikan adalah kemiskinan dan kurangnya motivasi masyarakat. Muller dalam Nahrodin (2016:33) menyatakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan struktur institusional adalah variabel utama yang mengakibatkan kesempatan masyarakat terutama anak putus sekolah untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat. Akibat tekanan kemiskinan dan latar belakang sosial orang tua yang kurang berpendidikan. Kondisi tersebut remaja tidak dapat merasakan bahwa pendidikan itu sangat penting bagi masa depannya.

Dengan demikian salah satu faktor penyebab anak putus sekolah adalah faktor ekonomi keluarga yang merupakan faktor pendukung berlangsungnya pendidikan seseorang. Keluarga yang kurang beruntung ekonominya tidak dapat membiayai pendidikan anak sehingga anak harus mengalami putus sekolah karena sekolah membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dengan kondisi ekonomi yang kurang beruntung yang dialami oleh masyarakat, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk menikmati pendidikan sesuai dengan keinginan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus maka tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan generasi muda dan kondisi masyarakat pada masa yang akan datang. Generasi muda akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, mengalami kondisi ekonomi yang rendah dan dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu harus dilakukan upaya untuk mengurangi angka putus sekolah pada anak usia sekolah, maka diperlukan peran pemerintah dalam hal perekonomian.

Fungsi pemerintah dalam perekonomian, menurut Digdowniseiso, 2015:39-40 adalah: 1. Fungsi Alokasi Yang dimaksud fungsi alokasi dalam kebijakan publik adalah fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi atau barang publik dan bagaimana komposisi barang publik ditetapkan. 2. Fungsi Distribusi Yang dimaksud dengan fungsi distribusi dalam kebijakan publik adalah penyesuaian atas distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. 3. Fungsi Stabilisasi Yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi dalam kebijakan publik adalah penggunaan kebijakan anggaran sebagai alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi, dengan memperhitungkan akibat kebijakan pada perdagangan dan neraca pembayaran.

Pemerintah memiliki fungsi alokasi penyediaan barang publik yang dibutuhkan masyarakat, yaitu pendidikan. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan nasional, harus berupaya memikirkan penyelesaian masalah ini melalui penyediaan keuangan yang memadai untuk alokasi pendidikan. Pemerintah memberikan alokasi anggaran pendidikan agar warga

negara dapat menikmati pendidikan dengan layak. Disinilah kemudian peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan akan sangat diharapkan, yaitu perlunya memberikan alokasi yang cukup bagi pendidikan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan publik yang memiliki tugas memikirkan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Aspek pembiayaan merupakan area pembahasan Keuangan Publik berikutnya. Secara tipikal, pemerintah perlu memberikan stimulus pada perekonomian melalui kebijakan belanjanya yang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana belanja tersebut dapat didanai oleh pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pemerintah. (Digdowiseiso, 2015: 8-9).

Sebagai pemegang keuangan publik, pemerintah menjalankan seluruh kegiatan yang pelaksanaannya disusun berdasarkan perencanaan, pendapatan dan pengeluaran selama kurun waktu satu tahun. Dengan kegiatan perencanaan, pendapatan dan pengeluaran tersebut, maka pemerintah akan mampu membiayai sektor-sektor publik, termasuk sektor pendidikan agar masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Alokasi anggaran pendidikan tersebut harus digunakan dengan benar dan tepat agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu pengelolaan keuangan dari alokasi dana pendidikan harus dilaksanakan dan dibuat dengan baik agar mampu menyediakan pendidikan yang bermutu dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau meningkatkan pendidikan sehingga angka putus sekolah dapat dikurangi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Siagian, 1984, 175-176 adalah: keseluruhan proses, teknik, dan metoda belajar-mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi pendidikan sebagaimana diungkapkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sementara itu tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Bahwa pendidikan akan menjadikan manusia menjadi lebih baik, maka setidaknya masyarakat tahu akan makna pendidikan dan seharusnya masyarakat dapat menikmati pendidikan dengan baik sampai jenjang tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan barang publik eksternalitas. Eksternalitas didefinisikan sebagai biaya atau manfaat dari transaksi pasar yang tidak tercermin dalam harga. (Digdowiseiso, 2015, 24).

Klasifikasi barang publik, menurut Digdowiseiso (2015)



Putus Sekolah

Putus sekolah adalah belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar (KBBI, 2020). Sedangkan menurut Millen Kaufman dan Whitener dalam Nahrodin, 2016: 11, mendefinisikan bahwa, anak putus sekolah adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau murid yang tidak tamat menyelesaikan program belajarnya. Menurut Musfiqoh dalam Nasrudin (2016: 33) bahwa putus sekolah adalah berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat siswa tersebut belajar, artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Dengan demikian putus sekolah merupakan proses tidak selesainya anak dari sebuah lembaga Pendidikan akibat berhentinya program belajar karena sebab tertentu. Berhentinya anak dari lembaga pendidikan bisa karena terpaksa, namun bisa juga disengajaja karena sebuah kondisi yang melatarbelakanginya.

Gunarsa (2000:71-72) mengungkapkan bahwa penyebab putus sekolah dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal, secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 1) Faktor Internal, yaitu yang bersumber dari dalam diri remaja putus sekolah, seperti tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, malas sekolah, kurang percaya diri, dan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya. 2) Faktor Eksternal a) Motivasi. Kurangnya motivasi dari orang tua menyebabkan anak malas sekolah, suka bolos, hura-hura dan keluyuran yang tidak ada manfaatnya. Kurangnya motivasi tersebut sehingga menyebabkan anak putus sekolah. b) Faktor Ekonomi. Keluarga Ekonomi keluarga merupakan faktor pendukung keberlangsungan pendidikan seseorang. Keluarga yang kurang beruntung ekonominya, menyebabkan tidak dapat membiayai pendidikan anak, sehingga anak harus terputus sekolahnya, sebab sekolah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. c) Lingkungan Sosial. (Pergaulan) Lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja, sehingga menyebabkan remaja menjadi terpengaruh akan kebiasaan dan tingkah laku masyarakat. Istilah psikologi sosial berarti tahapan kehidupan seseorang dibentuk oleh pengaruh sosial melalui interaksi-interaksi dengan suatu organisme dalam hal fisik dan psikologi. d) Perhatian Orang Tua. Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan variasi yang sesuai kemampuan. Kurangnya perhatian orang tua akan menyebabkan anak malas sekolah, sehingga putus sekolah menjadi jalan yang ditempuhnya. Kenakalan anak juga salah satunya disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua. e) Latar Belakang Pendidikan Orang Tua. Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar (SD) apalagi tidak tamat sekolah dasar, sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

Kondisi ekonomi yang rendah dalam keluarga bisa menyebabkan anak putus sekolah disebabkan oleh tidak adanya biaya. "salah satu alasan yang menyebabkan remaja putus sekolah, yang dikarenakan tidak adanya biaya dalam pemenuhan keperluan sekolahnya. Keadaan ekonomi keluarganya syarat utama pendukung seseorang untuk menyelesaikan pendidikannya." (Nahrodin, 2016, 71).

Dengan demikian, penyebab anak putus sekolah diantaranya adalah karena faktor ekonomi dan tidak adanya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk membangkitkan motivasi bagi anak dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Keuangan Publik

Keuangan publik: ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah. Karena itu, deinisi di atas menjadikan istilah keuangan publik identik dengan istilah keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik (Carl C. Plehm dalam Bastian).

Public financial management, on the other hand, may be defined as the system for generating and controlling public financial resources for effective and efficient public service delivery. It involves planning and budgeting, accounting and reporting, internal controls, audit and external oversight, among others with a view to: promoting availability of benefits to the greatest number of citizens; supports good governance; and facilitates the attainment of the 3 budgetary goals of aggregate fiscal discipline, effective allocation of resources to priorities and efficient service delivery (Nwoko and Anyanwu, 2012). Premchand (1999) in Onuorah and Appah (2012) sees public financial management as the link between the community's aspirations with resources, and the present with future. (Manajemen keuangan publik dapat didefinisikan sebagai sistem untuk menghasilkan dan mengendalikan sumber daya keuangan publik untuk pelayanan publik yang efektif dan efisien. Manajemen keuangan publik meliputi perencanaan dan penganggaran, akuntansi dan pelaporan, pengendalian internal, audit dan pengawasan eksternal, antara lain dengan maksud untuk: meningkatkan ketersediaan manfaat (benefit) untuk jumlah warga yang terbesar; mendukung pemerintahan yang baik (good governance); dan memfasilitasi pencapaian 3 tujuan anggaran disiplin agregat fiskal, alokasi sumber daya secara efektif untuk prioritas dan pelayanan yang efisien (Nwoko dan Anyanwu dalam Hamid, 2013, 5).

Manajemen keuangan publik juga dapat diartikan sebagai administrasi dana yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Dengan demikian, fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. (Bastian 1.3)

Dengan demikian manajemen keuangan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan perencanaan, penganggaran dan pelaporan atas semua masalah keuangan negara.

Tahapan Manajemen Keuangan Publik (PFM) menurut Hamid (2013):

1. Perumusan kebijakan:
Ini adalah transformasi aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang layak dengan implikasi keuangan yang diakui. Pemerintah perlu memiliki perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan kebijakan pemerintah.
2. Perumusan anggaran:
Perumusan anggaran adalah langkah yang melibatkan alokasi sumber daya sebelum diajukan ke legislatif untuk ditinjau dan disetujui
3. Struktur anggaran:
Struktur anggaran menjawab pertanyaan tentang bagaimana anggaran disusun atau seharusnya disusun. Di Nigeria, anggaran memiliki sisi pendapatan dan pengeluaran.
4. Sistem pembayaran:
Ini melibatkan prosedur operasional untuk menerima uang untuk publik dan untuk melakukan pembayaran kepada mereka.
5. Akuntansi pemerintah dan pelaporan keuangan:
Akuntansi pemerintah memerlukan pencatatan, peringkasan, komunikasi, analisis, dan interpretasi laporan keuangan pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan ganda untuk memenuhi persyaratan manajemen internal sambil memberikan publik jendela pada operasi pemerintah. Laporan

keuangan sendiri tidak berarti akuntabilitas tetapi mereka adalah bagian yang sangat diperlukan dari akuntabilitas.

6. Audit:

Audit adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah oleh auditor yang memenuhi syarat dengan tujuan utama untuk menyatakan pendapat atas pandangan yang benar dan wajar dari laporan keuangan. Tingkat korupsi yang tinggi di sektor publik Nigeria pada dasarnya sebagai akibat dari kegagalan audit dan tidak adanya audit value for money di sektor publik Nigeria.

7. Kontrol legislatif:

Badan legislatif (Dewan Perwakilan dan Senat) di Nigeria diharapkan untuk melakukan tugas yang sangat penting ini untuk mengontrol dan mengatur perkiraan pendapatan dan pengeluaran di tahun fiskal mana pun. Merupakan tanggung jawab anggota Majelis Nasional untuk memastikan bahwa perkiraan anggaran diteliti dengan benar untuk memastikan keakuratan, efektivitas dan efisiensi pendapatan dan pengeluaran pemerintah. (Hamid, 2013: 6).

Dengan demikian, maka dalam mengelola dana alokasi pendidikan yang perlu dilakukan adalah pencatatan dan pelaporan keuangan serta audit terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ketetapannya dituangkan dalam sebuah undang-undang pada periode tahun tertentu yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi. APBN yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kemudian dibuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran sebagaimana telah tertuang penyusunan rencana keuangan.

Dalam pendidikan, fungsi anggaran dapat digunakan untuk memotivasi kegiatan pendidikan, anggaran yang ada kemudian dibuat perencanaan, tujuan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan. Pencapaian kinerja pendidikan yang maksimal akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan sehingga dapat memacu motivasi masyarakat agar dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pengkajian terhadap literatur. Adapun proses pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan mengadakan studi pustaka terhadap berbagai konsep, teori, literatur, laporan dan hasil penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pencatatan data dilakukan dengan cara melakukan studi literatur dengan mengumpulkan data-data berupa laporan, hasil penelitian, konsep, teori, kemudian dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tersebut yang berkaitan dengan anggaran pendidikan di Indonesia.

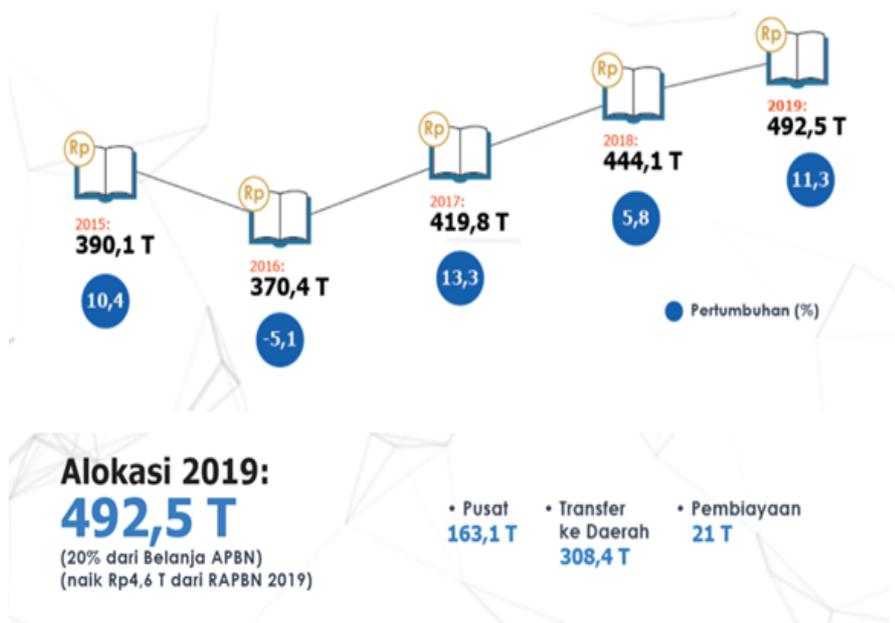
PEMBAHASAN

1. Prosentase Anggaran Pendidikan dalam APBN

Pemerintah memiliki kewajiban terhadap setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pemerintah harus berupaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

melaksanakan kewajiban pemerintah memenuhi hak warga negara, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan pendidikan melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dari keseluruhan APBN yang dialokasikan untuk biaya pendidikan tersebut jumlahnya sekurang-kurangnya adalah 20% sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 amandemen, artinya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan minimal 20%, jika dapat mengalokasikan lebih dari 20% akan lebih baik karena akan dapat memajukan pendidikan. Anggaran pendidikan tersebut yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan baik untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik agar pendidikan bertambah maju.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan Untuk Pemerintah Daerah Lebih Besar dibandingkan dengan Pemerintah Pusat



<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>

Melihat data alokasi anggaran pendidikan jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Alokasi anggaran 2019 jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi jika dilihat dari data tersebut, alokasi anggaran untuk pemerintah pusat terlalu kecil dibandingkan alokasi anggaran pendidikan untuk daerah yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pendidikan bagi pemerintah daerah masih tinggi, sementara pada masa desentralisasi ini daerah sebaiknya sudah mulai memikirkan daerahnya sendiri dengan menggali potensi yang ada di setiap daerah agar beban pemerintah pusat berkurang. Ketika pemerintah pusat telah menganggarkan setidaknya 20% dari APBN untuk Pendidikan maka daerah juga setidaknya menganggarkan setidaknya 20% untuk anggaran pendidikan.

Menurut World Bank, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan biaya pendidikan yang terbesar di dunia. Dengan 20 persen dari total pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah Indonesia untuk pendidikan dari negara Asia Timur, seperti Jepang yang hanya 9,3 persen, Korea 12,8 persen, tetapi Indonesia setara dengan Malaysia yaitu sebesar 21 persen, dan Singapura 17,7 persen. Alokasi dana pendidikan di Indonesia memang besar, tetapi dari alokasi dana tersebut, pemerintah daerah telah mendominasi penggunaannya melalui DAK dan DAU yang masih mengandalkan pemerintah pusat.

Berdasarkan data dari World Bank Document, bahwa kemampuan setiap daerah untuk mengelola dana dari pemerintah pusat, berupa DAU dan DAK berbeda-beda, sehingga alokasi untuk anggaran pendidikan di daerah juga berbeda-beda. "Of the 388 districts/cities that allocated 20 percent from

their budgets to education, only 270 (70 percent) achieved more than 95 percent realization rates. The remainder of these districts/cities had low realization rates and tended to have low capacity.”

Dari seluruh kabupaten/kota yang berjumlah 388 dikatakan bahwa yang mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 270 daerah atau sekitar 70% dengan tingkat pencapaian 95% serta sisa dari kabupaten/kota tersebut memiliki realisasi dan kapasitas yang rendah. Daerah yang memiliki standar tinggi akan mengalokasikan minimal 20% dari anggaran yang mereka punya untuk pendidikan. Padahal seharusnya pada masa desentralisasi, daerah diharapkan dapat mandiri untuk mencari potensi daerahnya dalam rangka menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat menurun dan nantinya bisa mandiri.

Kristina yang melakukan penelitian Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten di Sulawesi, untuk mengetahui pengaruh DAK dan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan, bahwa DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah bidang pendidikan. Pengaruh DAK terhadap belanja daerah bidang pendidikan lebih besar dibandingkan PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan.

“Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan dapat diambil dari sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Kristina, 2009, 26).

Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah benar-benar masih mengandalkan pemerintah pusat untuk memenuhi keperluan belanja daerah dan belum berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah mereka.

Menurut World Bank, pada pencatatan anggaran pendidikan di daerah sistem pencatatannya tidak standar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Pada penganggaran tidak memberikan informasi mengenai pengeluaran anggaran dasar pada pemerintah daerah, hal ini disebabkan oleh sistem pengeluaran yang tidak standar dimana pemerintah daerah memiliki perbedaan dalam sistem pencatatan pengeluaran sehingga sistem penganggaran antar daerah sulit dibandingkan dikarenakan perbedaan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan di setiap daerah. Masalah lain yang dialami adalah lemahnya penegakan terhadap prioritas nasional dalam hal pendidikan karena kurangnya pelaporan dan pemantauan terhadap pemerintah daerah yang disebabkan oleh sistem penganggaran yang tidak standar sehingga tidak mampu menghasilkan anggaran serta informasi pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan informasi keuangan di pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat dapat melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah. Perbedaan pencatatan keuangan di daerah ini membuat sulitnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengawasi jalannya alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah pusat memerlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan laporan keuangan terhadap anggaran Pendidikan di daerah sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan di daerah.

3. Anggaran Pendidikan di Indonesia Tidak Diprioritaskan Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan

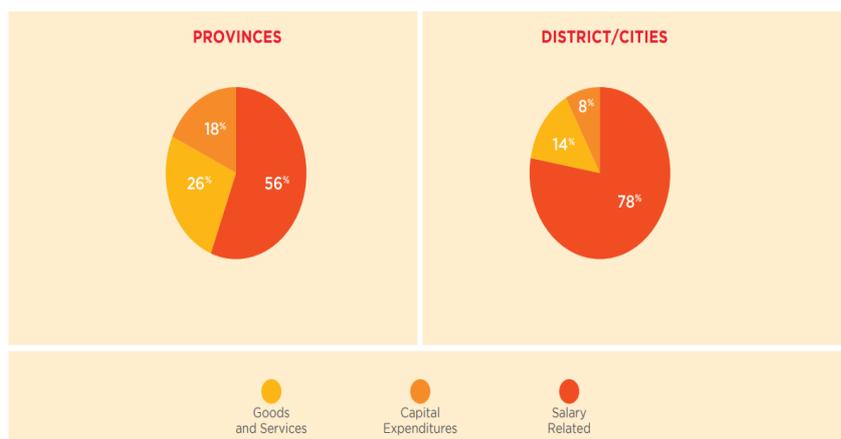
Dari data berikut ada beberapa kegiatan atau program yang bervariasi untuk memberikan nama kegiatan untuk pemberian gaji atau tunjangan bagi guru honorer.

DISTRICT	RANGE SALARY FOR NON PNS TEACHER PAID BY APBD	LOCAL MINIMUM WAGE	%	CoA PROGRAM CATEGORY	CoA ACTIVITY CATEGORY
Wonogiri	500,000	1,400,000	36%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penghargaan GTT dan PTT
Demak	300.000 - 1.200.000	2.065.000	58%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan bagi PTT dan GTT
Purworejo	450.000 - 800.000	1.300.000	35%-62%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal
Kab. Probolinggo	1.000.000	2.042.900	49%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penunjang Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Kab. Bojonegoro	250.000 - 1.000.000	1.858.000	13%-54%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Honorarium/Tunjangan Kinerja GTT/PTT
Kab. Kotim	1.190.000	2.776.460	43%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Guru Kontrak
Kota Semarang	2.125.000 - 2.400.000	2.125.000	100%-113%	Program Pelayanan Operasi Perkantoran/ Program Wajib Belajar	Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan/ Pendampingan BOS
Kota Surabaya	3.580.000	3.580.000	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	BOSDA

World Bank: Authors' calculation based on field data collection.

Bahwa proporsi terbesar dari anggaran pendidikan provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2018 dialokasikan untuk pembayaran gaji guru. Berdasarkan data World Bank dari anggaran belanja daerah provinsi untuk pendidikan, 56 persen dialokasikan untuk pembayaran gaji, 26 persen untuk barang dan jasa, dan 18 persen belanja modal. Sedangkan untuk kabupaten/kota terhadap anggaran di seluruh sampel kabupaten/kota adalah 78 persen dialokasikan untuk gaji, 14 persen dialokasikan untuk barang dan jasa, dan 8 persen dialokasikan untuk belanja modal. Menurut World Bank, bahwa 77 persen kabupaten mengalokasikan 70 persen dari anggaran mereka untuk pengeluaran terkait gaji, serta ada 32 kabupaten yang menghabiskan lebih dari 90 persen anggaran mereka untuk pembayaran gaji. Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang yang mengalokasikan 70 sampai 80 persen untuk pembiayaan gaji. Padahal sistem pendidikan yang memiliki kinerja tinggi lebih menghabiskan proporsi anggaran untuk belanja non gaji.

FIGURE 4.14
Districts/cities and provinces allocate most of their education budgets to salary-related expenditure



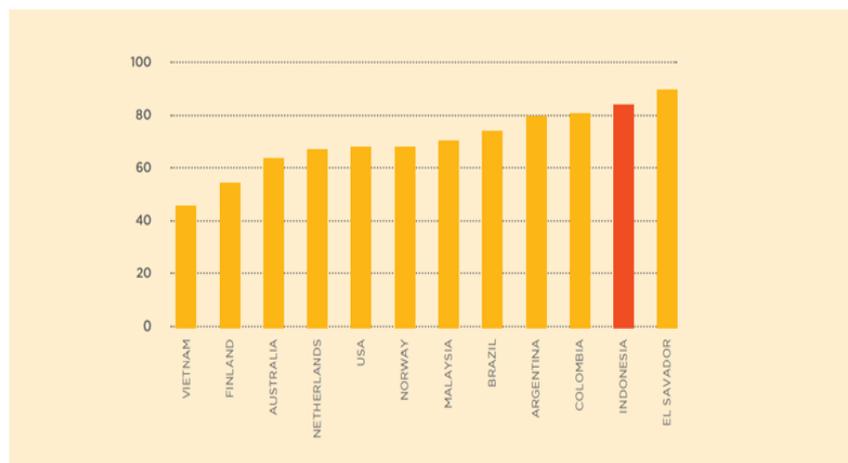
Source: MoF 2018

Pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan gaji guru relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini berdasarkan data Bank Dunia berdasarkan data tahun 2010, melihat rata-rata pengeluaran gaji guru di pemerintah kota/kabupaten pada saat itu sekitar 67

persen. Proporsi akan lebih tinggi jika menggunakan data yang dikumpulkan dari lapangan maupun dari laporan pengeluaran pendidikan kabupaten/kota.

Data berikut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki proporsi anggaran belanja yang besar untuk menggaji guru dibandingkan dengan negara yang membelanjakan anggarannya untuk sistem pendidikan yang berkinerja tinggi seperti Finlandia, Norwegia, Belanda, dan Amerika Serikat. Indonesia juga menghabiskan banyak anggaran dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

Share of education budget spent on teachers' salaries, selected countries



Source: UNESCO Institute for Statistics, 2017 or latest year, except for Indonesia, where the data are from the authors' own calculations based on data collected from the field research in 27 districts/cities.

Sumber: World Bank, 2020

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah porsi anggaran pendidikan yang digunakan untuk gaji dan tunjangan guru di Indonesia sangat tinggi. Besarnya anggaran yang dihabiskan untuk memberikan gaji dan tunjangan bagi guru, sebaiknya guru meningkatkan kompetensi dan meningkatkan pembelajaran siswa untuk meningkatkan kualitas belajar. Berdasarkan data di atas, bahwa negara-negara lainnya menghabiskan banyak anggaran untuk sistem pendidikan yang memiliki kinerja tinggi.

Adanya ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan dengan melakukan pengeluaran gaji lebih besar membuat kegiatan peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilaksanakan. Sebaiknya Indonesia mengikuti langkah negara lainnya, yaitu tidak menghabiskan anggaran pendidikan untuk memberikan gaji dan tunjangan pada guru, tetapi lebih kepada perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar lebih bermutu dan siswanya memiliki kualitas yang tinggi.

Dari pendapat tersebut, hal yang bisa dikutip untuk melihat pendidikan di Indonesia yaitu adanya beberapa kebijakan yang bisa diambil pemerintah:

1. Pemerintah daerah harus mengambil tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, misalnya dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah seperti guru kualitas dan kualifikasi, rasio siswa per guru, gaji guru dan insentif lainnya, sekolah fasilitas dan pemeliharaan, serta jumlah sekolah.
2. Pemerintah pusat harus mengupayakan peningkatan anggaran nasional di bidang Pendidikan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dan untuk memberikan dukungan keuangan kepada pemerintah daerah jika diperlukan. Pemerintah pusat harus mengubah skema beasiswa untuk menjangkau anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Kebijakan pemerintah yang lain adalah memberikan subsidi kepada keluarga. Pemerintah pusat juga harus memberikan kampanye untuk mempromosikan pentingnya pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu yang bisa menurunkan angka putus sekolah adalah adanya motivasi akan pentingnya untuk menuntut pendidikan bagi generasi yang akan datang. Motivasi ini berupa perbaikan pada sistem pendidikan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati pendidikan yang murah, berkualitas dan menarik. Agar masyarakat tertarik maka diperlukan upaya untuk memotivasi mereka dengan program-program pendidikan yang berkualitas dan perbaikan dalam pemberian pendidikan formal bagi masyarakat, termasuk keringanan untuk mengikuti pendidikan bagi masyarakat dengan ekonomi yang kurang baik sehingga masyarakat tertarik untuk menuntut pendidikan. Prosentase alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari keseluruhan APBN setiap tahun. Alokasi anggaran ini cukup tinggi dan setiap tahun jumlah anggaran yang diberikan bagi pendidikan terus meningkat.

Pemerintah daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan alokasi anggaran pendidikan untuk pemerintah daerah lebih besar dibandingkan alokasi untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah banyak menghabiskan anggaran untuk pembayaran gaji guru. Dari 388 kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran pendidikan hanya 270 daerah atau sekitar 70% dengan tingkat pencapaian 95% dan sisanya realisasinya rendah. Daerah yang memiliki standar tinggi akan mengalokasikan minimal 20% dari anggaran yang mereka punya untuk pendidikan. Pemerintah belum memiliki standar pencatatan penggunaan anggaran pendidikan di daerah-daerah yang mampu mengawasi jalannya pemanfaatan anggaran di daerah. Penganggaran tidak memberikan informasi mengenai pengeluaran anggaran dasar pada pemerintah daerah, penyebabnya karena perbedaan dalam sistem pencatatan pengeluaran sehingga sistem penganggaran antar daerah sulit dibandingkan dikarenakan perbedaan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan. Sistem penganggaran yang tidak standar juga membuat lemahnya penegakan terhadap prioritas nasional dalam hal pendidikan karena kurangnya pelaporan dan pemantauan terhadap pemerintah daerah sehingga pengawasan penggunaan anggaran tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Anggaran pendidikan provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2018 sebagian besar dialokasikan untuk pembayaran gaji guru. Dari anggaran belanja daerah provinsi untuk pendidikan, 56 persen dialokasikan untuk pembayaran gaji, 26 persen untuk barang dan jasa, dan 18 persen belanja modal, sedangkan untuk kabupaten/kota 78 persen dialokasikan untuk gaji, 14 persen dialokasikan untuk barang dan jasa, dan 8 persen dialokasikan untuk belanja modal. Bahwa 77 persen kabupaten/kota mengalokasikan 70 persen dari anggaran mereka untuk pembayaran gaji dan 32 kabupaten yang menghabiskan lebih dari 90 persen untuk pembayaran gaji. Dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang mengalokasikan 70 sampai 80 persen untuk pembiayaan gaji. Tingginya anggaran pendidikan yang dihabiskan untuk membayar gaji guru membuat anggaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan belum diprioritaskan. Dengan melihat hal tersebut, pemerintah daerah seharusnya telah mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada di daerah secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Saran

Pemerintah pusat harus dapat memastikan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus dilaksanakan untuk kegiatan perbaikan kualitas pendidikan agar masyarakat memiliki motivasi untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian maka angka putus sekolah dapat dikurangi.

Perlu dilakukan upaya pengawasan penggunaan anggaran pendidikan di daerah agar pemanfaatan benar-benar untuk peningkatan kualitas Pendidikan. Untuk mempermudah koordinasi penggunaan anggaran pada pemerintah daerah, sebaiknya dibuat sebuah sistem yang mampu menampung seluruh aktivitas dan laporan pemanfaatan anggaran bidang pendidikan untuk

mempermudah pengawasan alokasi dana pendidikan di daerah. Pemerintah pusat memerlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan laporan keuangan terhadap anggaran pendidikan di daerah sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan di daerah.

Perbaikan kualitas pendidikan sebaiknya segera dipikirkan oleh pemerintah pusat dengan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kualitas pendidikan serta memberikan dana transfer yang tidak terlalu besar bagi pemerintah daerah sehingga anggaran pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, F., Saerang, I.S., Tulung, J. E. (2019). Analisis Akurasi Model Zmijewski, Springate, Altman, Dan Grover Dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.35794/embra.v7i2.49101>

Bastian, Indra, *Filosofi Manajemen Keuangan Publik*. Diakses dari <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4405-M1.pdf>.

Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik*, Jakarta, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2015.

Digdowiseiso, K. (2010), *Measuring gini coefficient of education: the Indonesian cases*, Department of Economics, University of National, Indonesia,

Gunarsa, Ny. Y. Singgih D. (2000), *Psikologi Membimbing*, Jakarta, PT. Gunung Mulia

Siagian, Sondang P., (1984) *Pengembangan Sumber Daya Insan*, Jakarta, PT Gunung Agung

Hamid, K. T. (2013). *Good Governance and New Public Sector Financial Management Reform in Nigeria*,

Handayani, K. (2009). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi*. Skripsi.

Veronika, E., & Lestari, H. S. (2022). Risiko Kredit Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JMBS UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1306–1323. <https://doi.org/10.35794/jmbs.v9i3.43181>

World Bank, *Revealing How Indonesia's Subnational Governments Spend their Money on Education*, Jakarta, 2020. Diambil dari www.worldbank.org.

Undang-Undang/Peraturan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019

Sumber Online

- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- <http://visual.kemenkeu.go.id/apbn2018/>
- <http://visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019/>
- <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007>
- <https://keuangan101.blogspot.com/2017/05/pengertian-dan-fungsi-anggaran-sektor.html>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id/index.php>